

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Iim Nur; Afiah, Nunuy Nur, dan Pratama, Arie. 2019. "Pengaruh *Size, Wealth, Intergovernmental Revenue* dan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". *SIKAP, Vol 3 (No. 2), 2019, hal 147-165. p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876.*
- Artha, Risma Diri; Basuki, Prayitno dan MT., Alamsyah. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB)". *Jurnal InFestasi Vol. 11, No. 2, Desember 2015 hal. 214-229.*
- Djuniar, Lis dan Zuraida, Ida. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan". *Volume 3, Nomor 2, November 2018.*
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2019.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kiswanto dan Fatmawati, Dian. 2019. "Determinan Kinerja Pemerintah Daerah: Ukuran Pemda, *Leverage*, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya". *Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 3, (1), 2019, 44-54. e2579-9991, p2579-9975.*
- Kusuma, Priyan Mardya dan Kurniasih, Lulus. 2017. "Pengaruh Opini Audit dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia". *EQUITY VOL. 20 NO. 1.*
- Laporan Realisasi APBD 2018.
- Noviyanti, Nur Ade dan Kiswanto. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Accounting Analysis Journal 5 (1) (2016). ISSN 2252-6765.*
- Nurhayati, Netty; Rizani, Fahmi dan Kadir. 2019. "Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia". *Jurnal InFestasi Vol. 15 No. 1 Juni 2019 hal 67-82.*
- Parwanto, Endri dan Harto, Puji. 2017. "Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Diponegoro Journal of Accounting Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 1-9. ISSN (Online): 2337-3806.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02. Laporan Realisasi Anggaran.
- Qowi, Rizal dan Prabowo, Tri Jatmiko Wahyu. 2017. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012". *Diponegoro Journal of Accounting Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806.*
- Suheri; Cahyono, Yoyok dan Yunia, Dabella. 2018. "Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Banten: Perspektif Pendapatan Asli Daerah dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol. 11 No. 2, Oktober 2018 hal 276-292.*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Wijaya, Anthonius H. Citra; Rante Andika dan Ramandey, Putri Inda. 2018. "Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 13, Nomor 2, November 2018: 123-134.*